

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Tidak ada partisipasi (Manipulation, Therapy)

Revitalisasi Taman Kota 2 Bumi Serpong damai (BSD) yang dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum baru saja selesai pada akhir tahun 2021 lalu. Tujuan dilakukannya revitalisasi ini adalah untuk memberikan ruang terbuka hijau dan bersih. Dengan adanya ruang terbuka hijau seluas 7,2 hektar di tengah kota menjadikannya tempat strategis bagi masyarakat Tangsel yang ingin beristirahat sejenak dan menikmati hijaunya alam. Taman Kota 2 BSD kini hadir dengan wajah lebih asri dengan banyaknya fasilitas baru. Salah satu fasilitas terbarunya adalah Jaletreng River Park, yaitu pedestrian yang terbentang di sepanjang pinggiran sungai Jaletreng dengan mengadopsi konsep ruang terbuka sungai Cheonggyecheon, Korea Selatan. Sehingga membuatnya terlihat modern dan estetik seperti taman-taman di Kota Seoul. Kawasan pedestrian itu juga kerap dijadikan tempat foto oleh pengunjung karena dihiasi dengan berbagai macam mural yang cantik. Mulai dari kebudayaan Betawi hingga peta Kota Tangsel dengan corak batik.

Gambar 5.1 Taman Kota 2



Sumber : Google

Berbagai macam acara juga dapat dilakukan di Taman kota 2. karena terdapat Gelanggang Budaya Amphitheater (GBA) yang dibangunnya untuk mengembangkan kegiatan seni dan budaya, yang selanjutnya digunakan masyarakat untuk seni pertunjukan tari, teater, musik, dan lain-lain.

Taman Kota II di Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu ruang publik penting yang membutuhkan perhatian dalam hal partisipasi dan pengelolaan. Untuk memastikan keberhasilan revitalisasi dan pemanfaatan optimal taman ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama. Melalui rapat partisipatif, forum diskusi, dan kelompok kerja bersama, masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan dan pengembangan Taman Kota II. Pendapat, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat sekitar harus didengarkan agar desain, fasilitas, program, dan kegiatan yang ada di taman ini dapat mencerminkan keinginan dan kepentingan mereka.

Terdapat hubungan yang relevan antara situasi yang dijelaskan dan masukan yang diberikan. Ketika tidak ada partisipasi masyarakat dalam revitalisasi taman kota, manipulasi dapat terjadi dan dampak terapi sosial yang diharapkan dapat terganggu. Di sisi lain, ketika terjadi tokenisme dalam partisipasi, langkah-langkah seperti informing, consultation, dan placation mungkin dilakukan, tetapi tanpa memberikan kekuasaan yang substansial kepada masyarakat. Ini dapat mengurangi efektivitas revitalisasi dan dampak terapi sosial yang diharapkan. Namun, jika masyarakat memiliki kekuasaan dalam revitalisasi melalui partnership, delegated power, dan citizen control, partisipasi masyarakat menjadi lebih kuat, menghasilkan revitalisasi yang lebih positif dan dampak terapi sosial yang lebih signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memberikan kekuasaan kepada mereka dalam pengelolaan dan revitalisasi taman kota demi mencapai hasil yang optimal.

Gambar 5.2 Rapat Dalam Partisipasi



Sumber: Dokumen Pribadi

Perumusan Taman Kota II di Kota Tangerang Selatan merupakan proses penting dalam merencanakan dan mengembangkan taman tersebut. Untuk melakukan perumusan ini, data yang relevan perlu dikumpulkan dan dianalisis. Beberapa data yang harus dipaparkan termasuk data demografi penduduk di sekitar taman, kondisi lingkungan di sekitar taman, kebutuhan masyarakat terkait rekreasi dan fasilitas, data infrastruktur dan aksesibilitas, ketersediaan sumber daya, serta data dari kajian lingkungan jika ada.

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam perumusan Taman Kota II di Kota Tangerang Selatan merupakan langkah penting dalam memahami keadaan dan kebutuhan masyarakat serta lingkungan sekitar taman. Data demografi penduduk akan memberikan gambaran tentang jumlah penduduk, komposisi usia, kepadatan populasi, dan kebutuhan rekreasi masyarakat yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan revitalisasi. Data kondisi lingkungan akan memberikan informasi tentang aspek-aspek seperti keberlanjutan, keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan lingkungan yang penting dalam upaya revitalisasi yang berkelanjutan. Data mengenai kebutuhan masyarakat terkait rekreasi dan fasilitas akan membantu merancang taman dengan memperhitungkan preferensi dan minat masyarakat. Data tentang infrastruktur dan aksesibilitas akan membantu memastikan bahwa taman mudah dijangkau oleh masyarakat, serta mempertimbangkan kebutuhan akan fasilitas pendukung seperti transportasi dan parkir. Data

tentang ketersediaan sumber daya akan membantu dalam perencanaan dan alokasi anggaran yang efektif untuk revitalisasi taman kota. Jika terdapat hubungan dengan situasi yang dijelaskan, data dari kajian lingkungan akan memberikan informasi tentang dampak revitalisasi terhadap lingkungan sekitar. Data ini akan membantu menghindari manipulasi dalam revitalisasi dan memastikan bahwa terapi sosial dan kesejahteraan masyarakat juga diperhatikan dalam proses perumusan.

Dalam hal tokenisme, data yang dikumpulkan dan disajikan kepada masyarakat melalui informing dan consultation akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan mempengaruhi proses perumusan. Data ini akan menjadi dasar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menghindari kesan tokenisme. Jika masyarakat memiliki kekuasaan melalui partnership, delegated power, dan citizen control, data ini akan digunakan sebagai landasan yang kuat dalam proses perumusan. Masyarakat dapat memanfaatkan data ini untuk membuat keputusan yang berdaya guna dan memastikan bahwa revitalisasi taman kota mencerminkan keinginan dan kepentingan mereka. Pengumpulan dan analisis data yang relevan merupakan langkah penting dalam perumusan Taman Kota II di Kota Tangerang Selatan. Data ini berhubungan dengan situasi yang dijelaskan dan dapat digunakan untuk menghindari manipulasi, mencegah tokenisme, atau memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan revitalisasi yang lebih kuat.

Tabel 5.1 Demografi Daerah Tangerang Selatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Setu	80811	83777	86783	89825	92890
Serpong	170731	177677	184761	191968	199283
Pamulang	332984	341967	350923	359810	368603
Ciputat	225974	232559	239152	245727	252262
Ciputat Timur	202386	206729	211003	215186	219261
Pondok Aren	366568	379354	392284	405316	418420
Serpong Utara	163755	171749	179993	188476	197187
Kota Tangerang Selatan	1543209	1593812	1644899	1696308	1747906

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019

Data demografi penduduk akan memberikan gambaran tentang jumlah dan karakteristik penduduk di sekitar taman, sehingga dapat mempengaruhi desain dan fasilitas yang akan disediakan. Data lingkungan akan membantu memahami kondisi alam di sekitar taman, seperti jenis tanah dan ekosistem, yang akan menjadi dasar dalam merencanakan pengembangan taman yang sesuai dengan lingkungan.

Pelaksanaan Taman Kota II di Kota Tangerang Selatan melibatkan serangkaian langkah untuk mewujudkan rencana pengembangan taman tersebut. Berikut adalah paragraf yang menjelaskan pelaksanaan Taman Kota II: Setelah perumusan rencana yang komprehensif, tahap pelaksanaan Taman Kota II di Kota Tangerang Selatan dapat dimulai. Pertama-tama, langkah pertama adalah pengumpulan sumber daya yang diperlukan, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, dan bahan material yang akan digunakan dalam pembangunan taman. Hal ini melibatkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra potensial lainnya.

Gambar 5.3 Pembangunan Kali di Taman Kota 2



Sumber: Google

Selain itu, terdapat juga fasilitas-fasilitas lain seperti, tandon mini, playground, fitness outdoor, rumah panggung, taman bunga, dan skatepark. Banyaknya fasilitas baru menjadikan pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas mulai dari jogging, bersepeda, bermain skateboard, ataupun hanya jalan-jalan saja menikmati suasana asri pepohonan. Sambil melewati jalanan dengan suasana pepohonan yang rindang, para pengunjung juga dapat menikmati berbagai macam kuliner yang dijual pedagang di sepanjang sisi jalan. Mulai dari jajanan hingga makanan berat serta minuman-minuman yang beragam.

Taman Kota 2 BSD sendiri terletak di Jl. Letnan Sutopo, Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. berdekatan juga dengan kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Selatan. Yang bisa dengan mudah ditemukan dalam google maps. Setiap harinya Taman Kota 2 BSD buka dari pukul 06.00 - 18.00. Sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh publik, maka untuk masuk ke Taman Kota 2 BSD tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun akan dikenakan biaya jika membawa kendaraan motor, yaitu biaya parkir.

Pengelola Taman Kota 2 juga menambahkan salah satu yang kerap dinikmati masyarakat adalah pedestrian yang memiliki panjang sekitar 200 meter yang didesain sealiran dengan sungai, lengkap dengan kursi-kursi kayu

serta terdapat jembatan penghubung. Desain pedestrian yang cantik mengundang banyak pengunjung untuk datang.

Manipulasi Partisipasi aktif masyarakat dalam revitalisasi taman kota memainkan peran penting dalam memastikan manipulasi yang dilakukan berdampak positif. Melalui partisipasi, masyarakat dapat memberikan masukan, ide, dan perspektif yang berharga dalam proses manipulasi, sehingga perubahan yang terjadi dapat lebih tepat dan relevan dengan kebutuhan serta aspirasi mereka. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, manipulasi dalam revitalisasi taman kota tidak hanya menjadi suatu proses top-down, tetapi juga mencerminkan kepentingan dan keinginan nyata masyarakat sebagai pengguna utama. Dengan demikian, partisipasi masyarakat memberikan legitimasi dan keberlanjutan terhadap manipulasi yang dilakukan, sambil memastikan bahwa taman kota yang direvitalisasi dapat menjadi lingkungan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Therapi Revitalisasi taman kota memiliki keterkaitan erat dengan terapi dalam beberapa aspek. Melalui revitalisasi, taman kota menjadi tempat yang mendukung terapi alam, hortikultura, ruang terbuka, dan sosial. Perbaikan dan pengembangan taman kota menciptakan lingkungan alam yang indah, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merasakan manfaat terapi alam. Selain itu, adanya kegiatan berkebun dan perawatan tanaman dalam revitalisasi taman kota memberikan kesempatan untuk terapi hortikultura. Ruang terbuka yang direvitalisasi juga memberikan kesempatan untuk aktivitas fisik dan rekreasi, yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Terakhir, revitalisasi taman kota juga menciptakan kesempatan untuk terapi sosial dan komunitas melalui berbagai kegiatan komunitas dan interaksi sosial yang terjadi di taman kota yang ditingkatkan. Dengan demikian, revitalisasi taman kota tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat terapi yang beragam bagi kesejahteraan masyarakat.

5.2 Tokenisme (**informing, consultation dan placation**)

Hak masyarakat dalam penataan ruang diatur pada pasal 60 UU No.26 Tahun 2007, yaitu: hak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, dan memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang dan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/ atau pemegang izin bila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai rencana menimbulkan kerugian

Peran aktif dari masyarakat secara langsung merupakan prinsip dari partisipasi dalam proses pembangunan. Suhendi dalam (Novian & Machdum, 2020) mengungkapkan bahwa suatu pembangunan akan terhambat prosesnya atau tidak maksimal hasil akhirnya apabila masyarakat tidak ikut serta dan cenderung pasif dalam proses pembangunan. Penjelasan tersebut menunjukkan seberapa pentingnya peran atau partisipasi aktif dari masyarakat terhadap kegiatan pembangunan.

Pengelolaan taman kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan pihak lain yakni pihak swasta dan masyarakat (Daniati, 2019). Berjalannya pengelolaan taman karena adanya keterlibatan pihak lain dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan taman. Adanya keterlibatan masyarakat, komunitas, dan organisasi dapat meningkatkan interaksi sosial sehingga dapat membangun hubungan baik antara pengelola dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan taman (Asti et al., 2021). Menurut Arnstein (1969) partisipasi masyarakat berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan masyarakat.

Peran masyarakat dalam proses pembangunan terdapat dalam Perda Kota Tangerang No.6/2012 tentang RTRW Wilayah Kota Tangerang 2012-2032 yang mengatakan bahwa masyarakat memiliki peran serta dalam penataan ruang pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Taman merupakan salah satu jenis dari ruang terbuka hijau, sehingga masyarakat juga memiliki hak dalam penataan taman pada tahap perencanaan hingga pengendalian.

Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu informan dalam penelitian mengungkapkan bahwa dalam proses perencanaan dan pengelolaan taman kota 2 Tangerang Selatan ini tidak melibatkan masyarakat secara langsung, hal tersebut dikarenakan sudah ada penanggung jawab dalam proses tersebut yaitu Dinas terkait seperti Dinas Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Fakta tersebut berarti tidak sesuai dengan Perda Kota Tangerang No.6/2012.

Pengetahuan merupakan salah satu aspek dari tingkat partisipasi tipologi Arnstein yang dijelaskan oleh Permatasari (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan taman karena tidak adanya kegiatan sosialisasi atau diskusi yang diadakan oleh pemerintah. Aspek yang kedua adalah manfaat, artinya masyarakat memahami manfaat dari kegiatan pengelolaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat mengetahui dan paham manfaat dari kegiatan pengelolaan taman. Aspek yang terakhir yaitu kehadiran masyarakat dalam kegiatan, berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa tidak ada kegiatan mengenai pengelolaan taman yang diadakan oleh pemerintah. Meski demikian, masyarakat mengaku bahwa mereka tetap bersedia secara sukarela untuk hadir apabila kegiatan tersebut diadakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman masih berada pada tingkat yang rendah sesuai dengan tangga partisipasi Arnstein. Temuan penelitian menunjukkan beberapa aspek yang terkait dengan tingkatan

partisipasi masyarakat. Pertama, pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan taman terbilang minim. Hal ini dikarenakan kurangnya kegiatan sosialisasi atau diskusi yang diadakan oleh pemerintah. Masyarakat hanya diberi informasi tanpa adanya kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Aspek ini sesuai dengan tingkat partisipasi "Informing" dalam tangga partisipasi Arnstein. Kedua, meskipun pengetahuan masyarakat terbatas, mereka memiliki pemahaman mengenai manfaat dari kegiatan pengelolaan taman. Meski tidak ada kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, masyarakat tetap menyadari manfaat tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan tingkat partisipasi "Placation" dalam tangga partisipasi Arnstein, di mana masyarakat diberi kesan bahwa mereka terlibat dalam pengambilan keputusan meskipun sebenarnya keputusan telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, walaupun tidak ada kegiatan pengelolaan taman yang diadakan oleh pemerintah, masyarakat menyatakan kesiapan untuk hadir apabila kegiatan tersebut diadakan. Ini menunjukkan potensi partisipasi masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dalam tangga partisipasi Arnstein, seperti "Partnership" atau "Delegated Power", di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman, diperlukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai manfaat dari pengelolaan taman. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan menuju tingkatan yang lebih tinggi dalam tangga partisipasi Arnstein.

Dalam kalimat di atas, terdapat dua tingkatan partisipasi yang dapat dikaitkan dengan teori Arnstein. Pertama, pengetahuan masyarakat yang terbatas mengenai pengelolaan taman, karena kurangnya kegiatan sosialisasi atau diskusi yang diadakan oleh pemerintah, mencerminkan tingkat partisipasi "Informing" dalam tangga partisipasi Arnstein. Pada tingkat ini, masyarakat hanya diberikan informasi secara pasif tanpa adanya kesempatan

untuk berpartisipasi aktif atau berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Kedua, kesiapan masyarakat untuk hadir apabila kegiatan pengelolaan taman diadakan oleh pemerintah menunjukkan potensi partisipasi pada tingkat yang lebih tinggi dalam tangga partisipasi Arnstein, seperti "Partnership" atau "Delegated Power". Pada tingkat ini, masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan taman. Dengan demikian, dalam kalimat tersebut, terdapat indikasi adanya tingkatan partisipasi "Informing" dan potensi menuju tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam tangga Arnstein.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan berada pada level *informing*. Menurut Arnstein (1969) level tersebut adalah level dimana masyarakat memperoleh informasi mengenai manfaat dari kegiatan pengelolaan, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat dan menyampaikan usulan.

Permatasari (2018) dalam penelitiannya menjelaskan lebih detail bahwa level *informing* adalah kondisi dimana masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang pengelolaan taman, namun mengetahui manfaat dari pengelolaan taman dan bersedia mengikuti kegiatan mengenai pengelolaan taman tersebut secara sukarela. Level *informing* termasuk dalam derajat *Tokenism*. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa *tokenism* adalah derajat dimana pemerintah hanya sekedar mengiyakan masukan dan aspirasi masyarakat tanpa ada jaminan akan direalisasikan, hanya sekedar justifikasi agar mengiyakan.

Dalam konteks yang dijelaskan, terdapat beberapa hubungan yang relevan dengan tingkatan partisipasi yang disebutkan:

1. Tidak ada Partisipasi (Manipulation, Therapy):

Dalam situasi di mana masyarakat tidak memiliki partisipasi dalam pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan, terdapat indikasi adanya manipulasi atau pengaruh yang tidak adil dalam pengambilan keputusan terkait penataan taman. Masyarakat tidak diberi kesempatan

untuk berkontribusi aktif atau menyampaikan usulan, yang dapat menghambat proses partisipasi yang sehat dan dapat mengurangi manfaat terapi sosial yang diharapkan dari penggunaan taman.

2. Tokenisme (Informing, Consultation, Placation):

Level partisipasi yang disebutkan dalam penelitian, yaitu tingkat informing, mencerminkan tingkatan tokenisme dalam tangga partisipasi Arnstein. Pemerintah hanya memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dari pengelolaan taman, tetapi tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat atau berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa partisipasi masyarakat hanya digunakan sebagai justifikasi formal tanpa memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan taman.

Gambar 5.4 Pemerintah memberi informasi terhadap masyarakat



Sumber: Dokumen Pribadi

3. Masyarakat memiliki kekuasaan (Partnership, Delegated Power, Citizen Control):

Tingkat partisipasi yang lebih tinggi, seperti partnership, delegated power, atau citizen control, belum mencapai dalam konteks pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan yang dijelaskan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk terlibat lebih aktif dalam pengelolaan taman jika diberikan kesempatan. Hal ini terlihat dari kesiapan masyarakat untuk hadir dalam kegiatan

pengelolaan taman jika diadakan oleh pemerintah. Potensi ini menunjukkan potensi pergeseran menuju tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam tangga Arnstein.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan saat ini berada pada tingkat informing atau tokenisme. Masyarakat diberi informasi tentang manfaat dari pengelolaan taman, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Namun, terdapat potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat jika diberikan kesempatan yang lebih luas. Untuk mencapai tingkat partisipasi yang lebih tinggi, seperti partnership, delegated power, atau citizen control, diperlukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai manfaat dari pengelolaan taman.

Gambar 5.5 Masyarakat diberi informasi tentang manfaat dari pengelolaan taman



Sumber: Dokumen Pribadi

Hubungan antara tokenisme dengan tingkat partisipasi taman kota adalah penting untuk dipahami dalam konteks partisipasi masyarakat yang autentik dan berkelanjutan. Tokenisme merujuk pada tindakan atau kebijakan yang memberikan kesan partisipasi atau representasi masyarakat secara sekadar simbolis atau kosmetik, tanpa melibatkan mereka secara substansial dalam proses pengambilan keputusan atau implementasi program. Dalam konteks tingkat partisipasi masyarakat taman kota, jika partisipasi masyarakat

hanya dilakukan untuk memenuhi tuntutan formalitas atau penampilan, tanpa memberikan kesempatan nyata bagi masyarakat untuk memiliki pengaruh dan kontribusi yang signifikan dalam perencanaan dan pengelolaan taman kota, maka dapat terjadi tokenisme. Informing, yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat, memiliki hubungan penting dengan tingkat partisipasi masyarakat taman kota. Dalam konteks tingkat partisipasi, penyampaian informasi yang jelas, transparan, dan terbuka kepada masyarakat merupakan elemen kunci yang mendukung partisipasi yang efektif. Informing memainkan peran penting dalam memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang tingkat partisipasi, rencana perubahan, manfaat yang diharapkan, serta tanggung jawab mereka sebagai anggota komunitas dalam menjaga dan memanfaatkan taman kota. Konsultasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses tingkat partisipasi taman kota. Konsultasi yang efektif melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait revitalisasi tersebut. Dalam konteks ini, konsultasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan, ide, kekhawatiran, dan aspirasi mereka terkait tingkat partisipasi taman kota. Melalui konsultasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan lokal, pengalaman, dan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan perencana dan pengambil keputusan untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dan akurat dalam merancang tingkat partisipasi taman kota yang responsif dan relevan bagi masyarakat setempat. Placation, yang mencerminkan usaha untuk meredakan atau menenangkan kekhawatiran atau ketidakpuasan masyarakat, memiliki hubungan yang penting dengan tingkat partisipasi taman kota. Dalam konteks tingkat partisipasi, placation dapat terjadi ketika pemerintah atau lembaga terkait hanya memberikan respons atau tindakan kosmetik untuk meredakan kekhawatiran masyarakat, tanpa melakukan perubahan yang signifikan atau mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Namun, untuk mencapai tingkat partisipasi taman kota yang berhasil, penting untuk menghindari placation dan berusaha untuk mengatasi masalah yang

mendasarinya. Placation yang dilakukan tanpa langkah-langkah konkrit dan perubahan substansial dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat dan menyebabkan ketidakpuasan yang lebih besar di masa depan.

5.3 Masyarakat Memiliki Kekuasaan (Partnership, delegated power dan citizen control)

Peraturan Pemerintah RI nomor 68 tahun 2010 telah mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan tata ruang sebagai kegiatan aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat diharapkan memberikan masukan mengenai:

1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang dan atau
5. Penetapan rencana tata ruang. Selain itu masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sementara keikutsertaan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa pelaporan dan pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat terhadap pembangunan yang dianggap melanggar dan tidak sesuai dengan tata ruang. Tata cara peran masyarakat tersebut dilaksanakan dengan cara menyampaikan masukan melalui media komunikasi dan atau forum pertemuan.

Nasution dalam (Setiawan et al., 2020) berpendapat bahwa penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan, hal tersebut dikarenakan masyarakat memegang peranan penting dalam *good governance* yang dapat memberikan peningkatan

terhadap kualitas kebijakan pembangunan, menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan, serta menjamin terakomodasinya suara kelompok marjinal. Hal ini berarti masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara memiliki peran penting dalam proses pembangunan.

Salah satu pembangunan di suatu daerah adalah Ruang Terbuka Hijau yang identik dengan area terbuka yang memiliki luas serta panjang tertentu dengan berbagi macam pepohonan dan taman yang biasa digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di ruang terbuka seperti olahraga, berwisata, atau menyalurkan hobi (Amin, 2018). Salah satu jenis RTH menurut Permendagri No.1/2007 adalah Taman Kota.

Taman Kota merupakan RTH yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Mashuri dalam (Salshabila & Sukmawati, 2021) yang mengatakan bahwa taman kota dan hutan kota berperan penting bagi lingkungan hidup masyarakat. Taman kota merupakan salah satu visual yang sangat dibutuhkan masyarakat yang tinggal dipertanian sebagai penyejuk mata. Selain itu taman kota juga memiliki fungsi penting seperti paru-paru kota, pengendali iklim mikro, dan sebagainya sehingga memberi kenyamanan bagi masyarakat yang mengunjunginya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan yaitu pemanfaatan taman sebagai sarana untuk beraktivitas, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan taman dan fasilitas yang ada, serta membantu mempromosikan taman melalui media sosial. Mulyanie dan Husna (2019) mengatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerahnya baik sebagai objek maupun objek sangat diharapkan karena pembangunan pada kawasan perkotaan dapat terlaksana dengan baik khususnya kawasan ruang terbuka hijau.

Dari uraian diatas, maka bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan termasuk dalam partisipasi menerima manfaat (*participation in benefits*). Cohen dan Uphoff dalam (Indriani et al., 2021) menjelaskan bahwa partisipasi menerima manfaat

adalah bentuk partisipasi yang ditunjukkan dengan memanfaatkan hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang ditemukan di lapangan bahwa informan mengaku untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan taman salah satunya adalah dengan memanfaatkan keberadaan taman tersebut untuk melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan. Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tata ruang dan pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan, dapat dihubungkan dengan Teori Arnstein tentang tangga partisipasi. Teori Arnstein, yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein pada tahun 1969, memaparkan tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program publik. Teori Arnstein terdiri dari delapan tingkatan partisipasi, dengan bagian bawah tangga menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah dan bagian atas menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan dapat dikaitkan dengan tingkatan partisipasi level informing, jadi pendapat atau argumentasi masyarakat yang cukup minim hanya dapat didengarkan, masyarakat hanya memberikan pendapat atau masukan hanya sedikit dan terbatas atau minimnya pengetahuan tentang pengelolaan taman kota 2. Dengan menghubungkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan dengan Teori Arnstein, dapat diketahui bahwa Berdasarkan analisis terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada tingkat "Information" dalam tangga partisipasi Arnstein, yang termasuk dalam derajat semu (degrees of tokenism). Hal ini disebabkan oleh kurangnya kegiatan sosialisasi, diskusi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan taman.

Selain itu, berdasarkan pendapat Ndraha dalam (Fauziah & Nasdian, 2021) bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan termasuk dalam bentuk partisipasi menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang

diperoleh bahwa bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Kota 2 Tangerang Selatan yaitu pemanfaatan taman sebagai sarana untuk beraktivitas, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan taman dan fasilitas yang ada, serta membantu mempromosikan taman melalui media social. Masyarakat Memiliki Kekuasaan Hubungan antara masyarakat memiliki kekuasaan dan bentuk pengelolaan taman kota sangat penting dalam menciptakan proses partisipatif yang efektif. Ketika masyarakat merasa memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait bentuk pengelolaan taman kota, mereka menjadi agen yang berdaya untuk membentuk perubahan yang diinginkan. Memberikan kekuasaan kepada masyarakat berarti melibatkan mereka secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program. Masyarakat harus diberdayakan untuk mengungkapkan aspirasi, kebutuhan, dan ide-ide mereka terkait perubahan yang ingin mereka lihat dalam taman kota mereka. Melalui keterlibatan yang substantif, masyarakat dapat memberikan kontribusi berharga berdasarkan pengetahuan lokal mereka. Ketika masyarakat memiliki kekuasaan, mereka merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap bentuk pengelolaan taman kota. Mereka akan lebih cenderung terlibat dalam perawatan, pemeliharaan, dan penggunaan taman kota dengan rasa memiliki dan kepedulian yang tinggi. Hal ini dapat menciptakan ikatan yang kuat antara masyarakat dan taman kota mereka, yang berkontribusi pada keberlanjutan revitalisasi dan pemeliharaan jangka panjang. Dalam mengembangkan kekuasaan masyarakat, penting untuk memastikan akses yang adil dan inklusif terhadap informasi, sumber daya, dan kesempatan partisipasi. Dengan memberikan kekuasaan kepada masyarakat dalam bentuk pengelolaan taman kota, hasil yang dihasilkan akan lebih akurat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partnership, Delegated Power, Citizen Control Hubungan antara partnership, delegated power, citizen control, dan bentuk pengelolaan taman kota mencerminkan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait

lainnya. Berikut adalah hubungan antara ketiga konsep tersebut dengan revitalisasi taman kota:

1. Partnership (Kemitraan): Partnership atau kemitraan melibatkan kerja sama aktif antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau bentuk pengelolaan taman kota. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan keahlian yang berbeda, partnership menciptakan platform untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan kekuatan yang berpotensi menghasilkan hasil yang lebih baik.
2. Delegated Power (Delegasi Kekuasaan): Delegated power mengacu pada pemberian kekuasaan dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam bentuk pengelolaan taman kota. Ini berarti memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan bertindak sebagai pemangku kepentingan utama. Dengan memberikan kekuasaan kepada masyarakat, mereka menjadi bagian yang aktif dan memiliki kendali dalam perencanaan, implementasi, dan pengelolaan taman kota. Delegasi kekuasaan ini memungkinkan masyarakat untuk merasa memiliki dan bertanggung jawab, yang secara keseluruhan meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang.
3. Citizen Control (Kendali Masyarakat): Citizen control menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang efektif dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan terkait bentuk pengelolaan taman kota. Ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Dengan citizen control, masyarakat memiliki kontrol yang kuat terhadap keputusan dan tindakan yang terkait. Hal ini memastikan bahwa taman kota benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Citizen control juga memungkinkan masyarakat untuk secara aktif memantau pelaksanaan, memberikan umpan balik, dan mengawasi penggunaan sumber daya yang digunakan. Dalam hubungan ini, partnership memberikan kerangka kerja kolaboratif, delegated power memberikan masyarakat kekuasaan dan tanggung jawab

yang substansial, sementara citizen control memastikan partisipasi masyarakat yang efektif dan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Ketiga konsep ini saling melengkapi dalam memastikan bahwa taman kota melibatkan masyarakat secara nyata, mewakili kepentingan mereka, dan menghasilkan perubahan yang positif dan berkelanjutan.